



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : TENTARA NASIONAL INDONESIA
UNIT KERJA : MABES TNI AU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADJAR PRASETYO
2. Jabatan : KEPALA STAF TNI AU
3. NHK : 655828

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 8.767.500.000**

1. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 82.500.000
2. Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 82.500.000
3. Tanah Seluas 2700 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 32.500.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 52.500.000
6. Tanah Seluas 511 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 62.500.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m2/193 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 4.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 335.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD X 2.4 Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 210.000.000



2. MOBIL, TOYOTA NEW CAMRY 2.4 Tahun 2011, HASIL SENDIRI

Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 139.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.932.343.169

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 12.173.843.169

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.173.843.169

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.